



DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



Alamat : Jl. Diponegoro No. 15 Kudus
Telp (0291) 438152, Faks (0291) 435030
Email : dinkes@kuduskab.go.id
Website : dinkes.kuduskab.go.id

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025.

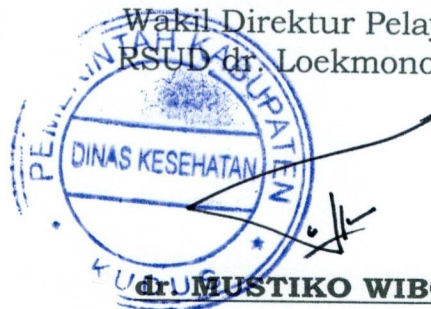
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Segala kritik dan saran yang terkait penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2025 ini akan kami terima dengan senang hati demi perbaikan kinerja kami ke depannya.

Kudus, 29 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
Wakil Direktur Pelayanan
RSUD dr. Loekmono Hadi,



dr. MUSTIKO WIBOWO
Pembina Tk.I
NIP. 198209152009031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan..... 1

1.3 Dasar Hukum 2

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah 3

1.5 Permasalahan Utama..... 19

1.6 Cascading Renstra 19

1.7 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun Sebelumnya 36

BAB II PERENCANAAN *DAN PERJANJIAN* KINERJA 37

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator 37

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 39

2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025..... 41

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 56

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 58

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 58

3.2 Analisis Capaian Kinerja60

3.3 Efisiensi Anggaran.. 77

3.3 Inovasi dan Penghargaan.....102

BAB IV PENUTUP 105

4.1 Kesimpulan.....105

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja 106

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kudus. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025, dengan tujuan:

1. mengetahui capaian kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025;
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kinerjanya;
3. sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 40);
13. Keputusan Bupati Kudus Nomor 000.8.6.3/8/2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

1.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

1) Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian;
- b. 3 (tiga) Bidang dan masing-masing bidang sebanyak 3 (tiga) subkoordinator.

Selain itu terdapat UPTD berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 19 UPTD Puskesmas dan 1 (satu) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

2) Tugas Pokok

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

3) Fungsi

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- b) Penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- c) Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- d) Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;

- e) Pengendalian dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- f) Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- g) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- h) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan dinas. Sekretariat terdiri dari :

- a) Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
- b) Subbag Umum dan Kepegawaian

Adapun fungsi dari bagian sekretariat adalah :

- a) Perumusan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- b) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- c) Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d) Pengelolaan organisasi dan tata laksana Dinas.
- e) Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas.

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam

menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat meliputi gizi masyarakat dan kesehatan keluarga, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a) Sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
- b) Sub koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- c) Sub koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja.

Adapun fungsi dari bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah :

- a) Perumusan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- c) Pengkoordinasian tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- d) Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan
- e) Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian penyakit meliputi pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, surveylan dan Imunisasi serta Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bidang Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- a) Sub koordinator surveillance dan Imunisasi
- b) Sub koordinator Pengendalian Penyakit Menular
- c) Sub koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Adapun fungsi bidang Pengendalian Penyakit adalah :

- a) Perumusan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c) Pengkoordinasian tugas di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan;
- e) Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

4) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan pengendalian kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi perijinan, sertifikasi, farmasi, perbekalan kesehatan, manajemen informasi, dan pengembangan kesehatan serta Pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

- a) Sub koordinator Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan;
- b) Sub koordinator Perbekalan dan Alat Kesehatan; dan
- c) Sub koordinator SDK, Perijinan, Sertifikasi dan Manajemen Informatika.

Adapun fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan adalah :

- a) Perumusan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- c) Pengkoordinasian tugas di bidang Pelayanan dan Sumber Daya kesehatan;
- d) Pembinaan, fasilitasi dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan
- e) Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

5) Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Dinas

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada lingkup Dinas Kesehatan ada dua (2) yaitu:

- a) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. UPTD Puskesmas di Kabupaten Kudus berjumlah 19 UPTD yang tersebar di sembilan (9) kecamatan.

- b) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus bahwa UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan. UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

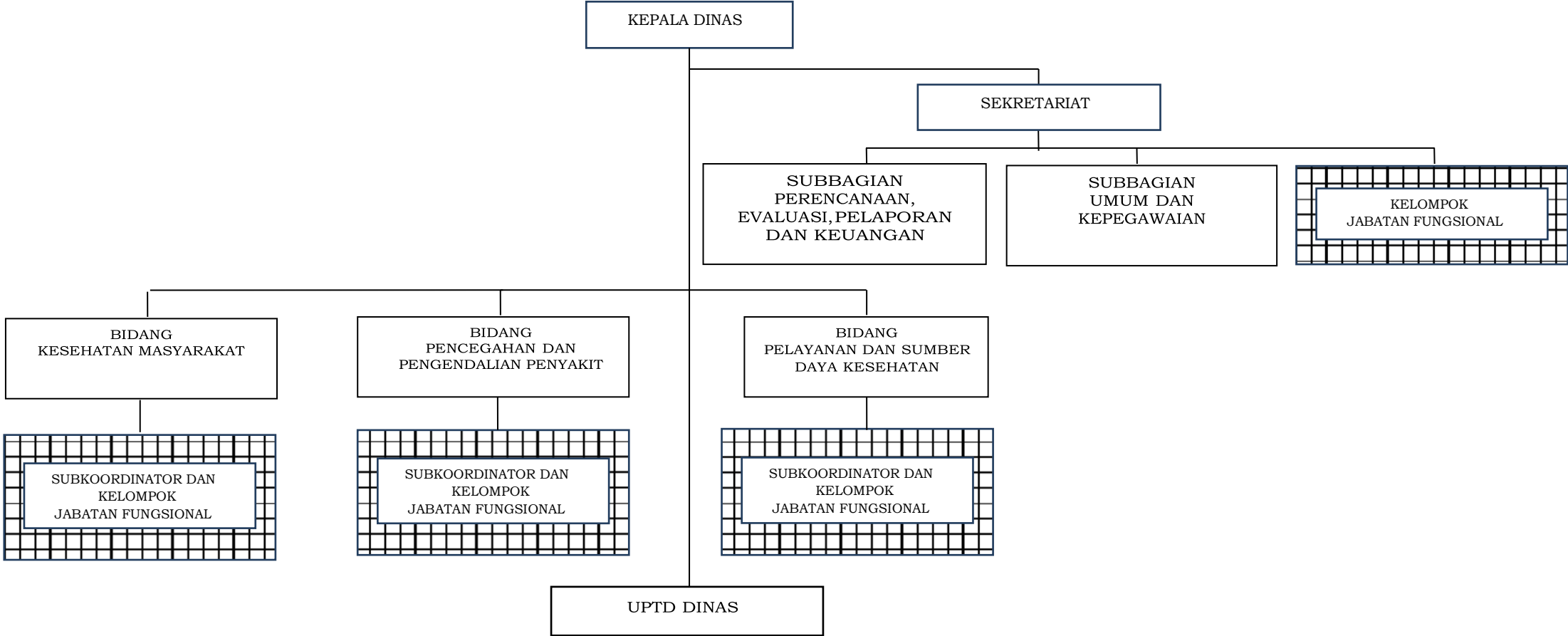
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; dan

- c) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan/atau Subkoordinator sesuai bidang tugasnya.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebagaimana dalam gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus



c. Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tahun 2025 memiliki sumber daya manusia yang tersebar di Dinas Kesehatan, 19 UPTD Puskesmas, 1 UPTD Laboratorium Kesehatan dan 1 UOBK RSUD Loekmono Hadi.

1) Pejabat Struktural

Pejabat struktural lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2025 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas : 1 orang
- b. Sekretaris : 1 orang
- c. Kepala Bidang : 1 orang
- d. Kepala Sub Bagian : 2 orang
- e. Kepala Puskesmas : 19 orang
- f. Kepala Labkes : 1 orang
- g. Kepala Tata Usaha Puskesmas dan Labkes : 20 orang

2) Jumlah Pegawai

Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berikut jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus berdasarkan tingkat Pendidikan:

Tabel 1.1
Jumlah Tenaga di Lingkungan Dinas Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	ASN					NON ASN				
		JUMLAH (PEGAWAI)			PERSENTASE (%)		JUMLAH (PEGAWAI)			PERSENTASE (%)	
		L	P	TOTAL	L	P	L	P	TOTAL	L	P
1	2	3	4	6	7 (3/6*100)	6 (4/6*100)	8	9	10	11 (8/10*100)	12 (9/10*100)
A.	Dinas Kesehatan	25	39	64	39,1	60,9	35	16	51	68,6	31,4
1.	S2	4	4	8	50	50	0	0	0	0,0	0,0
2.	S1/D4	13	25	38	34,2	65,8	9	8	17	52,9	47,1
3.	D3	2	8	10	20,0	80,0	1	6	7	14,3	85,7
4.	SMA/Sederajat	6	2	8	75,0	25,0	25	2	27	92,6	7,4
5.	SMP/Sederajat	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
6	SD/MI	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
B.	UPTD Laboratorium Kesehatan	4	8	12	33,3	66,7	5	3	8	62,5	37,5
1.	S2	1	2	3	33,3	66,7	0	0	0	0,0	0,0
2.	S1/D4	1	1	2	50,0	50,0	0	1	1	0,0	100,0
3.	D3	1	5	6	16,7	83,3	0	0	0	0,0	0,0
4.	SMA/Sederajat	1	0	1	100,0	0,0	5	2	7	71,4	28,6
5.	SMP/Sederajat	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0

NO.	PENDIDIKAN	ASN					NON ASN				
		JUMLAH (PEGAWAI)			PERSENTASE (%)		JUMLAH (PEGAWAI)			PERSENTASE (%)	
		L	P	TOTAL	L	P	L	P	TOTAL	L	P
1	2	3	4	6	7 (3/6*100)	6 (4/6*100)	8	9	10	11 (8/10*100)	12 (9/10*100)
6	SD/MI	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
C.	UPTD Puskesmas	103	592	695	14,8	85,2	42	6	48	87,5	12,5
1.	S2	1	10	11	9,1	90,9	0	0	0	0,0	0,0
2.	S1/D4	63	243	306	20,6	79,4	4	1	5	80,0	20,0
3.	D3	28	318	346	8,1	91,9	0	1	1	0,0	100,0
4.	D1	0	5	5	0,0	100,0	0	0	0	0,0	0,0
5.	SMA/Sederajat	10	16	26	38,5	61,5	36	2	38	94,7	5,3
6.	SMP/Sederajat	1	0	1	100,0	0,0	1	2	3	33,3	66,7
7.	SD/MI	0	0	0	0,0	0,0	1	0	1	100,0	0,0
D.	RSUD dr.Loekmono Hadi	169	321	490	34,5	65,5	193	273	466	41,4	58,6
1	S2	4	2	6	66,7	33,3	-	-	-	0,0	0,0
2	S2 Profesi	22	17	39	56,4	43,6	5	2	7	71,4	28,6
3	S1/D4	5	9	14	35,7	64,3	-	-	-	0,0	0,0
4	S1/D4 Profesi	98	192	290	33,8	66,2	81	109	190	42,6	57,4
6	D3 28/51	27	51	78	34,6	65,4	53	111	164	32,3	67,7
6	SMA/Sederajat	12	49	61	19,7	80,3	46	50	96	47,9	52,1
7	SMP/Sederajat	0	0	0	0,0	0,0	6	0	6	100,0	0,0
8	SD/MI	1	1	2	50,0	50,0	2	1	3	66,7	33,3

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kesehatan

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa komposisi tenaga ASN di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Labkes sebagian besar adalah ASN.

3) Puskesmas Tanpa Dokter

Kabupaten Kudus tahun 2025 tersedia Dokter dari 19 Puskesmas sudah 100%. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.2
Puskesmas Tanpa Dokter di Kabupaten Kudus
Tahun 2025

KETERANGAN	JUMLAH	%
Total	19	100%
Tanpa Dokter	0	0.00%
Tersedia Dokter	19	100%

Sumber : SISDMK 28 Desember 2025

Sedangkan jumlah dokter masing-masing puskesmas sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Jumlah Dokter di Puskesmas Kabupaten Kudus Tahun 2025

NO.	NAMA	TINGKATAN	DOKTER
1	Kaliwungu	Rawat Inap	4
2	Sidorekso	Rawat Inap	2
3	Wergu Wetan	Non Rawat Inap	3
4	Purwosari	Non Rawat Inap	3
5	Rendeng	Non Rawat Inap	5
6	Jati	Non Rawat Inap	3
7	Ngembal Kulon	Non Rawat Inap	3
8	Undaan	Rawat Inap	5
9	Ngemplak	Non Rawat Inap	2
10	Mejobo	Rawat Inap	7
11	Jepang	Rawat Inap	8
12	Jekulo	Rawat Inap	5
13	Tanjungrejo	Rawat Inap	8
14	Bae	Non Rawat Inap	3
15	Dersalam	Non Rawat Inap	3
16	Gribig	Rawat Inap	6
17	Gondosari	Non Rawat Inap	3
18	Dawe	Rawat Inap	7
19	Rejosari	Rawat Inap	8

Sumber : SISDMK 28 Desember 2025

Jumlah dokter di tabel adalah jumlah dokter yang terdiri dari dokter difinitif puskesmas dan dokter internsip.

4) Puskesmas Lengkap 9 Jenis Tenaga Kesehatan Wajib

Sampai dengan tahun 2025 penentuan standar ketenagaan minimal di puskesmas berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Repulik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu Dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik.

Tahun 2025 Kabupaten Kudus 89,47% lengkap 9 jenis tenaga kesehatan wajib, sedangkan puskesmas yang masih belum terpenuhi 9 tenaga kesehatan wajib adalah Puskesmas Sidorekso (belum ada Tenaga Sanitasi Lingkungan) dan

Puskesmas Jepang (belum ada Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku).

Tabel 1.4

Rincian Jenis Tenaga Kesehatan Wajib di Puskesmas
Kabupaten Kudus Tahun 2025

Nama Fasyankes	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Dokter Gigi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Nutrisisionis	Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian	Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer	Perawat	Bidan
KALIWUNGU	1	1	2	1	2	2	4	9	26
SIDOREKSO	0	1	1	1	2	2	2	9	15
NGEMBAL KULON	1	1	1	1	1	2	3	7	14
NGEMPLAK	1	1	1	1	1	2	2	8	12
JEPANG	1	0	1	2	2	3	8	10	20
BAE	1	1	1	1	1	2	3	5	15
DERSALAM	1	1	1	1	1	2	3	7	12
GRIBIG	1	1	1	1	2	2	6	14	19
WERGU WETAN	1	1	1	1	1	2	3	6	16
PURWOSARI	1	2	1	1	1	2	3	6	13
RENDENG	1	1	1	1	1	2	5	6	12
JATI	1	1	1	1	1	2	3	13	18
UNDAAN	1	1	1	1	2	2	5	15	29
MEJOBLO	1	1	1	2	2	2	7	15	25
TANJUNGREJO	1	1	1	2	2	2	8	11	29
GONDOSARI	1	2	1	1	1	2	3	5	17
DAWE	1	2	1	1	2	2	7	18	34
REJOSARI	1	1	1	1	2	3	8	14	28
JEKULO	1	1	1	1	1	2	5	16	22

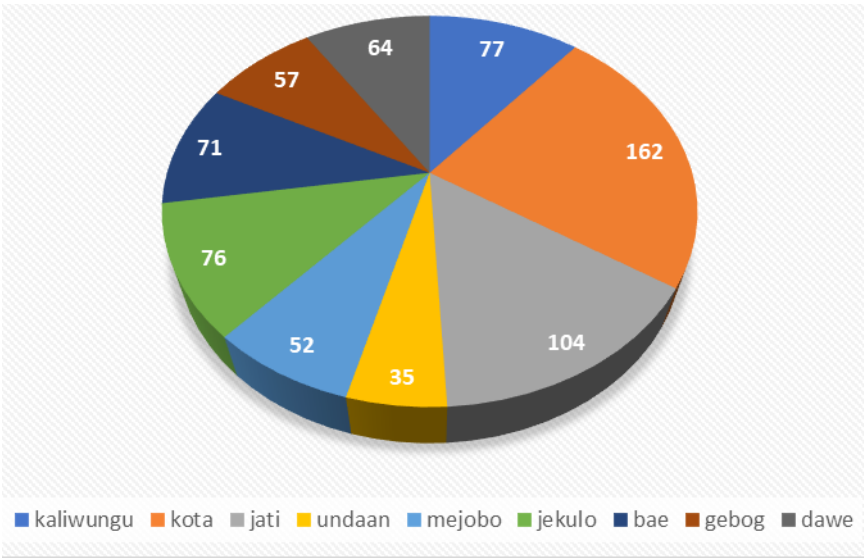
Sumber : SISDMK 28 Desember 2025

d. Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan tentunya harus memperhatikan standar pelayanan minimal agar semua masyarakat dapat terlayani dengan baik menurut Standar Pelayanan Minimal Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 bahwa dalam menentukan sebaran fasilitas kesehatan harus memperhatikan indikator berupa tingkat pelayanan, jumlah penduduk, umur penduduk, dan lokasi di pusat lingkungan/ kecamatan dengan kriteria bersih, mudah dicapai, tenang jauh dari sumber penyakit, sumber bau/sampah, dan pencemaran lainnya. Sebaran fasilitas

pelayanan kesehatan di Kabupaten Kudus terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Praktik Mandiri, Laboratorium Kesehatan, Sarana Kefarmasian dan Alkes (Apotik, PBF, Industri Kosmetik), Optik, Dinas Kesehatan, dan UTD PMI tersebar di sembilan kecamatan, rinciannya sebagai berikut:

Gambar 1.2
 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2025



Sumber : SISDMK 28 Desember 2025

e. Sarana Prasarana

1) Institusi Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Salah satu fokus Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kudus adalah menyelenggarakan upaya penyediaan fasilitas kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kudus. Hal tersebut diupayakan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, di Kabupaten Kudus terdapat 630 fasilitas kesehatan yang sudah terdata, sebagaimana tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6
 Jumlah Institusi Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun 2025

NO	JENIS FASYANKES/UNIT KERJA	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan	1
2	Rumah Sakit	11

NO	JENIS FASYANKES/UNIT KERJA	JUMLAH
3	Puskesmas	19
4	Klinik	68
5	Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan :	
	a. Apotik	172
	b. PBF	5
	c. Industri Kosmetik	2
6	Laboratorium Kesehatan	7
7	Unit Transfusi Darah	1
8	Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan :	
	a. Dokter	121
	b. Dokter Gigi	80
	c. Dokter Spesialis	20
	d. Dokter Gigi Spesialis	3
	e. Bidan	55
	f. Perawat	58
	g.Terapis Gigi & Mulut	2
	h. Psikologi Klinis	4
	i. Terapis Wicara	1
JUMLAH		630

Sumber : SISDMK 28 Desember 2025

2) Rumah Sakit

Di Kabupaten Kudus, terdapat delapan (8) rumah sakit umum dan tiga (3) rumah sakit khusus yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, dan Jekulo. Namun, masih ada beberapa kecamatan seperti Bae, Gebog, dan Dawe yang tidak memiliki rumah sakit baik umum maupun khusus. Sebaran data rumah sakit di Kabupaten Kudus seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Menurut di Kabupaten Kudus Tahun 2025

NO	KECAMATAN	RUMAH SAKIT UMUM	RUMAH SAKIT IBU dan ANAK
1	Kaliwungu	3	1
2	Kota Kudus	2	2
3	Jati	2	-
4	Undaan	-	-
5	Mejobo	-	-
6	Jekulo	1	-
7	Bae	-	-
8	Gebog	-	-
9	Dawe	-	-
Jumlah		8	3

Sumber : SISDMK 28 Desember 2025

Sedangkan jumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Kudus baik milik Pemerintah dan swasta berjumlah 11 Rumah

Sakit, terdiri dari 8 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit khusus ibu dan anak. Data jenis dan tingkatan rumah sakit di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8
Data Puskesmas di Kabupaten Kudus Tahun 5

NO	NAMA FASYANKES	JENIS	KELAS	PENYELENGGARAAN
1	RSUD dr. Loekmono Hadi	RSU	B	Pemkab
2	RS Mardi Rahayu	RSU	B	Swasta
3	RSI Sunan Kudus	RSU	C	Swasta
4	RS. Kumala Siwi Mijen	RSU	D	Swasta
5	RS. Aisyiyah	RSU	D	Swasta
6	RS. Nurussyifa	RSU	D	Swasta
7	RS Kartika Husada/ Rumkitban	RSU	D	TNI
8	RS Sarkies Aisyiah Kudus	RSU	C	Swasta
9	RSIA Permata Hati	RSIA	C	Swasta
10	RSIA Harapan Bunda	RSIA	C	Swasta
11	RSIA Miriam	RSIA	C	Swasta

Sumber : Data Deskripsi SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Berdasarkan data ketersediaan tempat tidur (TT) dan rata-rata *Bed Occupancy Rate* (BOR) di rumah sakit Kabupaten Kudus, terlihat adanya variasi baik dalam kapasitas maupun tingkat pemanfaatan layanan rawat inap sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.9
Jumlah Tempat Tidur dan Rata-Rata BOR Rumah Sakit di Kabupaten Kudus Bulan Desember Tahun 2025

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR	RATA- RATA BOR (%)
1	RSUD dr.Loekmono Hadi	387	80
2	RS Mardi Rahayu	385	85
3	RSI Sunan Kudus	200	74,54
4	RS Kumala Siwi	100	95
5	RS Sarkies 'Aisyiyah	150	95
6	RS Aisyiyah	148	99
7	RS Nurussyifa	99	97
8	RS Kartika Husada	50	25
9	RSIA Miriam	25	16
10	RSIA Harapan Bunda	39	39

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR	RATA- RATA BOR (%)
11	RSIA Permata Hati	25	14

Sumber : Data Simkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Bulan Desember Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah TT terbesar dimiliki oleh RSUD dr. Loekmono Hadi sebanyak 385 TT, disusul oleh RS Mardi Rahayu dengan 385 TT, serta RSI Sunan Kudus sebanyak 200 TT. Sedangkan kapasitas TT terkecil terdapat di RSIA Miriam dan RSIA Permata Hati yang masing-masing memiliki 25 TT. Secara umum, kapasitas TT di Kabupaten Kudus cukup memadai dengan distribusi antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

Sedangkan tingkat pemanfaatan tempat tidur menunjukkan variasi yang signifikan. RS Aisyiah mencatat BOR tertinggi yakni 99%, yang berarti tingkat hunian melebihi kapasitas tersedia sehingga menunjukkan tingginya kebutuhan layanan rawat inap di rumah sakit ini. Beberapa rumah sakit lain juga menunjukkan BOR tinggi, yaitu RS Sarkies dan RS Kumala Siwi. Tingginya BOR di rumah sakit tersebut mencerminkan tingginya permintaan layanan kesehatan, sekaligus mengindikasikan potensi overload pada kapasitas TT yang tersedia. Sebaliknya, terdapat rumah sakit dengan BOR rendah, misalnya RS Kartika Husada (25%), RSIA Miriam (16%), serta RSIA Permata Hati (14%). Rendahnya BOR di rumah sakit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan jenis layanan, persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan, ataupun distribusi pasien yang lebih terpusat ke rumah sakit besar.

3) Puskesmas

Kabupaten Kudus memiliki 19 UPTD Puskesmas yaitu 10 Puskesmas Rawat Inap dan 9 Puskesmas Non Rawat Inap yang tersebar di 9 kecamatan. Adapun data Puskesmas sebagai berikut pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.10
Data Puskesmas di Kabupaten Kudus Tahun 2025

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JENIS	TINGKATAN
1	Kaliwungu	Kaliwungu	Perkotaan	Rawat Inap
		Sidorekso	Perkotaan	Rawat Inap
2	Kota	Purwosari	Perkotaan	Non Rawat Inap

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JENIS	TINGKATAN
		Wergu Kulon	Perkotaan	Non Rawat Inap
		Rendeng	Perkotaan	Non Rawat Inap
3	Jati	Jati	Perkotaan	Non Rawat Inap
		Ngembal Kulon	Perkotaan	Non Rawat Inap
4	Undaan	Undaan	Perkotaan	Rawat Inap
		Ngemplak	Perkotaan	Non Rawat Inap
5	Mejobo	Mejobo	Perkotaan	Rawat Inap
		Jepang	Perkotaan	Rawat Inap
6	Jekulo	Jekulo	Perkotaan	Rawat Inap
		Tanjung Rejo	Perkotaan	Rawat Inap
7	Bae	Bae	Perkotaan	Non Rawat Inap
		Dersalam	Perkotaan	Non Rawat Inap
8	Gebog	Gribig	Perkotaan	Rawat Inap
		Gondosari	Perkotaan	Rawat Inap
9	Dawe	Dawe	Perkotaan	Rawat Inap
		Rejosari	Perkotaan	Rawat Inap

Sumber : Data Deskripsi SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024

f. Pembiayaan Kesehatan

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang berdasar APBD Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.11.
Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus Tahun 2022 - 2025

No.	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2022	Rp. 116.324.202.545,00
2.	2023	Rp. 178.049.943.232,00
3.	2024	Rp. 222.768.428.591,00
4.	2025	Rp. 235.379.958.220,00

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan anggaran pembiayaan kesehatan yang signifikan, diantaranya karena adanya meningkatnya dukungan anggaran dari sumber dana Dana ALokasi Umum (DAU) earmark untuk urusan kesehatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

1.5 Permasalahan Utama

Adapun permasalahan yang dihadapi pada pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Masih ada kematian ibu sebanyak 3 kasus;
2. Masih ada kematian bayi sebanyak 83 kasus;
3. Masih adanya balita stunting sebanyak 3,77%;
4. Indeks Keluarga Sehat (IKS) masih dalam kategori keluarga pra sehat (Indeks 0,76).

Beberapa isu strategis yang berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun 2024, diantaranya:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Penurunan prevalensi balita stunting;
4. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
5. Peningkatan jumlah keluarga sehat.

1.6 Cascading Rencana Strategis

Cascading renstra berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikatornya yang mengacu pada Cascading Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. Adapun cascading renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12.
Cascading Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas
					Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Angka Kematian Bayi (AKB)		Meningkatkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
					Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
			Angka Kematian Balita (AKBa)		Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional					Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Peningkatan status kesehatan keluarga	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan ibu maternal dan neonatal					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)		Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita				Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan
					Mempercepat penurunan dan penanganan balita stunting dan gizi buruk					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan
					Meningkatkan pelayanan gizi masyarakat		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif dan usia lansia		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Meningkatkan pelayanan kesehatan lingkungan dan		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Cakupan kunjungan bayi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					menyelenggarakan kabupaten sehat						Kesehatan Sesuai Standar
					Meningkatkan pengelolaan kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Cakupan balita ditimbang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Memperkuat pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Cakupan penjangkaran pada usia pendidikan dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai
				Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	Meningkatkan upaya penemuan dan penanganan penyakit menular		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Meningkatkan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa		Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Memperkuat sistem surveilans, kewaspadaan dini dan respon cepatterhadap penyakit yang berpotensi menyebabkan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB), bencana dan krisis		Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap		Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
				Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Mendorong partisipasi aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
					Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan						
					Mendorong pengembangan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan		Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
				Pemenuhan sediaanfarmasi, perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan makanan minuman	Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang yang positif Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
					Meningkatkan pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
					Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Orang yang Positif Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		Prevalensi Balita Gizi Buruk	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
										Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
							Persentase Desa/ Kelurahan STBM		Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
										Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
							Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)		Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah kelompok Orang dengan risiko Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
									Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditangulangi <24 jam	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
										Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
										Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
										Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
									Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
											dan Pemberian Obat Massal)
									Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
										Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
										Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
							Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama		Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
									Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
										Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan
								Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
										Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
										Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
								Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Minuman yang sesuai standar	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai dengan standar	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
								Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
								Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase produk makanan dan minuman PIRT yang diperiksa dan memenuhi syarat keamanan pangan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
								Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026

1.7 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025 (penilaian atas SAKIP tahun 2024), terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, yaitu:

Tabel 1.13.

Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan perbaikan rencana aksi, dokumen perencanaan, dan penganggaran dengan mendasarkan pada hasil capaian, pemantauan, evaluasi dan rekomendasi kinerja periode sebelumnya	▪ Melakukan penyempurnaan rencana aksi, dokumen perencanaan, serta penganggaran dengan mengacu pada hasil capaian kinerja, pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi kinerja tahun 2025. Perbaikan tersebut dilakukan melalui penajaman keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja, serta dilengkapi dengan bukti dukung yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan akuntabilitas kinerja untuk pelaksanaan tahun 2026; ▪ Melakukan penyusunan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang lebih terukur dan selaras pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya dan memperhatikan kebijakan, program prioritas, indikator RPJMN Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, serta Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK).
2	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja pada LKjIP dan atau laporan kinerja berkala lainnya sebagai dasar pemberian reward atau punishment atas pencapaian kinerja	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam LKjIP dan laporan kinerja berkala lainnya sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment atas pencapaian kinerja. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan pegawai, peningkatan motivasi kerja, serta perbaikan kinerja unit kerja guna mendorong peningkatan akuntabilitas dan pencapaian target kinerja organisasi. ▪ Tahun 2025 telah dilakukan pemberian penghargaan kepada Puskesmas dengan Pengelolaan Program Tuberkulosis Terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025 ▪ Selain itu juga dilakukan pembinaan terhadap pegawai yang melanggar kedisiplinan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja berisi informasi utuh mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikatornya yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan manifestasi komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kudus. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 14).

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Kondisi yang akan dicapai Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam bentuk tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Tujuan, sasaran dan indikator Renstra Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Nilai	0,6827	0,6830	0,6832	0,6834	0,6836	0,6836
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	88,24	80,89	80,58	80,27	80,00	80,00

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	7,7	7,7	7,70	7,50	7,00	7,00
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 Kelahiran Hidup	9,1	8,63	8,41	8,19	7,50	7,50
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,50
2	Tujuan: Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	33,29	33,45	33,55	33,75	33,75	33,75
	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	91,93	92,43	92,93	93,43	93,93	93,93

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai lima tahunan. Dinas Kesehatan mempunyai tujuan yang akan dicapai selama periode Renstra 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa), dan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Secara lebih detail, berikut definisi operasional pada masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran.

Tabel 2.2
Definisi Operasional Indikator Tujuan dan Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Rata-rata nilai indeks dari indikator komposit yang mencakup 30 indikator yang dikelompokkan menjadi tujuh sub indeks atau kelompok indikator berdasarkan topik bidang kesehatan yaitu: kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;	Dinas Kesehatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kasus kematian ibu baik disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Balita (AKBa)	Jumlah kematian anak berusia 0-5 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi);	Dinas Kesehatan
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Capaian angka perhitungan dari kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1 di satu wilayah pada kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat	Inspektorat

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pada Dinas Kesehatan dalam upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Strategi dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sesuai dengan strategi urusan kesehatan dalam RPD Kabupaten Kudus yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan. Arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus juga sesuai dengan arah kebijakan RPD Kabupaten Kudus, yaitu : 1)peningkatan kualitas Kesehatan ibu; 2)peningkatan kualitas Kesehatan bayi; 3)peningkatan penanganan gizi buruk dan stunting; 4)peningkatan pelayanan Kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular; 5)peningkatan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi TTU, TPM dan institusi; 6)peningkatan mutu fasilitas pelayanan dan 7)peningkatan upaya Kesehatan berbasis masyarakat. Berikut merupakan strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026:

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
Tahun 2024-2026

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 2. Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan 3. Meningkatkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu 4. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan 5. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
		Peningkatan status kesehatan keluarga	1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan ibu maternal dan neonatal 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita 3. Mempercepat penurunan dan penanganan balita stunting dan gizi buruk 4. Meningkatkan pelayanan gizi masyarakat 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif dan usia lansia 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan lingkungan dan menyelenggarakan kabupaten sehat 7. Meningkatkan pengelolaan kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga 8. Memperkuat pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
		Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	1. Meningkatkan upaya penemuan dan penanganan penyakit menular 2. Meningkatkan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa 3. Memperkuat sistem surveilans, kewaspadaan dini dan respon cepat terhadap penyakit yang berpotensi menyebabkan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB), bencana dan krisis 4. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan 2. Mendorong pengembangan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan
		Pemenuhan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan makanan minuman	1. Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan 2. Meningkatkan pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat Perangkat Daerah	1. Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem 2. Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset 3. Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan 4. Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar

2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, Dinas Kesehatan melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kudus Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran Dinas Kesehatan awal sebesar Rp.232.631.753.500,- dan perubahan Rp. 235.379.958.220,- dengan komposisi belanja; Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan 4 Program Teknis Kesehatan. Adapun besaran anggaran pada tiap program/ kegiatan/sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikatornya Dinas Kesehatan Tahun 2025

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Niai	93,43	93,43			
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	42	42	143.242.292.100	134.550.583.820	- 8.691.708.280
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	Persen	100	100	894.283.500	810.510.300	- 83.773.200
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	35	35	483.683.300	367.211.400	- 116.471.900
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	32	32	394.970.200	431.633.900	36.663.700
	1.02.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	6.550.000	6.365.000	- 185.000
	1.02.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	9.110.000	5.300.000	- 3.810.000
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen	81,5	81,5	135.324.394.400	126.846.934.500	- 8.477.459.900
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	17.678	17.678	135.146.184.000	126.689.462.000	- 8.456.722.000
	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	133.207.000	133.828.000	621.000
	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	72	45.003.400	23.644.500	- 21.358.900
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	Persen	50	50	200.000.000	120.000.000	- 80.000.000

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	200.000.000	120.000.000	- 80.000.000
	1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen	100	100	533.508.000	399.067.300	- 134.440.700
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	18.366.500	18.366.500	-
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	240.416.000	211.552.300	- 28.863.700
	1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	15	29.875.500	17.876.500	- 11.999.000
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	98.392.000	59.651.000	- 38.741.000
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	30.365.000	22.465.000	- 7.900.000
	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	4.200.000	4.200.000	-
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	111.893.000	64.956.000	- 46.937.000
	1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	532.143.000	440.823.000	- 91.320.000
	1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	340.945.000	340.945.000	-
	1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	114	26	191.198.000	99.878.000	- 91.320.000
	1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen	100	100	4.847.336.000	4.913.586.000	66.250.000
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	1.150.000	150.000	- 1.000.000

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	517.710.000	517.710.000	-
	1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	7	7	82.196.000	82.196.000	-
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	36	4.246.280.000	4.313.530.000	67.250.000
	1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100	100	910.627.200	1.019.662.720	109.035.520
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	41	257.432.000	257.432.000	-
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	54	52	653.195.200	762.230.720	109.035.520
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	80,27	80,27			-
				(kasus)	4	4			-
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,5	7,5			-
			Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 KH	8,19	8,19			-
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,45	0,45			-
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					87.012.484.400	98.047.104.100	11.034.619.700
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-
			Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100			-
			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	100	100			-
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1.000 penduduk	1,6	1,6			-

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
			Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (minimal strata utama)	Persen	100	100			-
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100			-
			Persentase Desa/ Kelurahan STBM	Persen	75	75			-
			Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	Persen	100	100			-
	1.2.2.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	Persen	100	100	26.968.189.200	31.050.521.100	4.082.331.900
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen	100	100			-
	1.2.2.201.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1	-	1.213.500.000	1.213.500.000
	1.2.2.201.3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	3	3	2.496.625.000	2.396.625.000	- 100.000.000
	1.2.2.201.6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	10	10	7.781.290.000	7.781.290.000	-
	1.2.2.201.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	1	2.034.716.500	2.045.986.500	11.270.000
	1.2.2.201.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	76	76	3.617.167.000	3.516.999.000	- 100.168.000

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
	1.2.2.201.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	58	58	112.591.000	247.543.000	134.952.000
	1.2.2.201.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, BahanHabis Pakai, BahanMedis Habis Pakai,Vaksin, Makanan danMinuman di FasilitasKesehatan yangdisediakan	Paket	4	4	10.925.799.700	13.848.577.600	2.922.777.900
	1.2.2.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	100	100	58.921.936.300	66.114.146.300	7.192.210.000
			Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100			-
			Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100			-
			Cakupan balita ditimbang	Persen	100	100			-
			Cakupan penjangkaran pada usia pendidikan dasar	Persen	100	100			-
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0.7	0.7			-
			Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Persen	83	83			-
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	Persen	100	100			-
			Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia	Persen	100	100			-
			Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur	Persen	100	100			-
			Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus	Persen	100	100			-

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persen	100	100			-
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	Persen	95	95			-
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	Persen	90	90			-
			Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	Persen	100	100			-
			Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditanggulangi <24 jam	Persen	100	100			-
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100			-
			Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	Persen	100	100			-
			Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Persen	98	98			-
			Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku	Persen	100	100			-
	1.2.2.202.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11462	11462	250.000.000	250.000.000	-
	1.2.2.202.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11462	11462	133.000.000	133.000.000	-
	1.2.2.202.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11362	11362	123.000.000	123.000.000	-
	1.2.2.202.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	56984	56984	714.000.000	714.000.000	-

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
	1.2.2.202.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Orang	126551	172598	110.000.000	305.000.000	195.000.000
	1.2.2.202.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	572447	572447	434.561.000	421.484.000	- 13.077.000
	1.2.2.202.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	103315	103315	37.250.000	36.836.500	- 413.500
	1.2.2.202.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	232426	232426	204.330.000	204.330.000	-
	1.2.2.202.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18032	18032	23.020.000	23.020.000	-
	1.2.2.202.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	2173	2173	45.959.000	45.959.000	-
	1.2.2.202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	12869	12869	151.683.600	151.683.600	-
	1.2.2.202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	16867	16867	245.195.800	245.195.800	-
	1.2.2.202.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	52	52	35.000.000	10.645.500	- 24.354.500
	1.2.2.202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12	12	2.736.000.000	3.232.784.700	496.784.700

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
	1.2.2.202.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	12	12	190.715.000	132.083.900	- 58.631.100
	1.2.2.202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	12	455.000.000	430.845.000	- 24.155.000
	1.2.2.202.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	12	630.740.200	723.591.500	92.851.300
	1.2.2.202.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	12	117.700.000	82.833.800	- 34.866.200
	1.2.2.202.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	125	125	82.130.000	82.130.000	-
	1.2.2.202.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	156	156	354.774.600	369.594.600	14.820.000
	1.2.2.202.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12	49.459.026.400	56.239.342.200	6.780.315.800
	1.2.2.202.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	50	50	215.000.000	215.000.000	-
	1.2.2.202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	12	12	50.000.000	50.000.000	-
	1.2.2.202.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	12.165.000	12.165.000	-
	1.2.2.202.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	36	36	341.739.700	241.149.200	- 100.590.500
	1.2.2.202.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	228	228	200.000.000	200.000.000	-
	1.2.2.202.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	52	52	150.000.000	150.000.000	-

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
	1.2.2.202.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	797.809.000	666.335.000	- 131.474.000
	1.2.2.202.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang yang positif Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	826	826	36.500.000	36.500.000	-
	1.2.2.202.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Orang yang Positif Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1908	1908	113.040.000	113.040.000	-
	1.2.2.202.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah kelompok Orang dengan risiko Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3000	3000	3.206.000	3.206.000	-
	1.2.2.202.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	12	469.391.000	469.391.000	-
	1.2.2.203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan	Persen	100	100	315.000.000	315.000.000	-
	1.2.2.203.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	3	3	315.000.000	315.000.000	-
	1.2.2.204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	Persen	100	100	807.358.900	567.436.700	- 239.922.200
	1.2.2.204.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	44	44	780.845.500	540.923.300	- 239.922.200
	1.2.2.204.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	11	11	26.513.400	26.513.400	-
	01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	879.637.000	857.956.800	- 21.680.200

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
	1.2.3.202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	150.000.000	128.319.800	- 21.680.200
	1.2.3.202.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	50.000.000	50.000.000	-
	1.2.3.202.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	920	920	50.000.000	50.000.000	-
	1.2.3.202.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	12	12	50.000.000	28.319.800	- 21.680.200
	1.2.3.203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya	Persen	100	100	729.637.000	729.637.000	-
	1.2.3.203.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	73	73	729.637.000	729.637.000	-
	01:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	Persen	100	100	339.568.000	533.078.000	193.510.000
	1.2.4.203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Persen	100	100	232.568.000	232.568.000	-

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
	1.2.4.203.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	60	60	232.568.000	232.568.000	-
	1.2.4.204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persen	100	100	75.000.000	75.000.000	-
	1.2.4.204.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	12	12	75.000.000	75.000.000	-
	1.2.4.205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan	Persen	100	100	32.000.000	225.510.000	193.510.000
	1.2.4.205.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	12	12	32.000.000	225.510.000	193.510.000
	01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	81,73	81,73	1.157.772.000	1.391.235.500	233.463.500

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkurang/ Bertambah
	1.2.5.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	100	100	625.000.000	858.463.500	233.463.500
	1.2.5.201.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	12	12	625.000.000	858.463.500	233.463.500
	1.2.5.202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	80.5	80.5	350.000.000	350.000.000	-
	1.2.5.202.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	12	350.000.000	350.000.000	-
	1.2.5.203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Posyandu aktif	Persen	85.7	85.7	182.772.000	182.772.000	-
	1.2.5.203.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	12	182.772.000	182.772.000	-
TOTAL							232.631.753.500	235.379.958.220	2.748.204.720

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Indikator kinerja kegiatan mencakup indikator input dan output, sedangkan indikator kinerja program diukur melalui indikator hasil (*outcome*) yang mencerminkan kontribusi utama kegiatan terhadap pencapaian program. Melalui perjanjian kinerja, ditetapkan komitmen dan kesepakatan kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang diperjanjikan tidak hanya mencakup hasil kegiatan tahun berjalan, tetapi juga *outcome* dari kegiatan tahun sebelumnya guna menjamin kesinambungan kinerja antar tahun.

Adapun tujuan perjanjian kinerja sebagai berikut:

1. Wujud nyata komitmen, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan, penghargaan dan sanksi;
4. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi; dan
5. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada Tahun 2025 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Kudus untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian. Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus melaksanakan 5 program yang didanai melalui APBN dan APBD Kabupaten Kudus.

Berikut perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025 terdiri dari 2, yaitu perjanjian kinerja awal dan perubahan karena adanya pergantian pimpinan dan perubahan anggaran:

a. Perjanjian Kinerja Awal

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	80,27
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	7,50
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 Kelahiran Hidup	8,19
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,45
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	93,43

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan program dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.6
Program dan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 87.012.484.400	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pajak Rokok - DBHCHT - DAK Fisik - DAK Non Fisik (BOK)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 879.637.000	- Pajak Rokok - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 339.568.000	- DAK Non Fisik (BOK) - DAK Non Fisik (POM) - Pajak rokok
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.157.772.000	- DAK Non Fisik (BOK) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Pajak rokok
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 143.242.292.100	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pajak rokok
TOTAL			Rp. 232.631.753.500	

b. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	80,27
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	7,50
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 Kelahiran Hidup	8,19
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,45
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	93,43

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan program dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.8
Program dan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 98.047.104.100	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pajak Rokok - DBHCHT - DAK Fisik - DAK Non Fisik (BOK)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 857.956.800	- Pajak Rokok - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 533.078.000	- DAK Non Fisik (BOK) - DAK Non Fisik (POM) - Pajak rokok
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.391.235.500	- DAK Non Fisik (BOK) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Pajak rokok
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 134.550.583.820	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pajak rokok
TOTAL			Rp. 235.379.958.220	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi serta pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja menjadi aspek penting dalam menjamin terwujudnya nilai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari besarnya sumber daya atau biaya yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan secara tepat, yaitu kemampuan dalam menetapkan tujuan yang sesuai serta memilih alternatif dan cara terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Akuntabilitas kinerja juga digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa dalam mewujudkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan/ditentukan beberapa program dengan beberapa kegiatan operasionalnya melalui penerapan indikator kinerja. Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Terdapat dua jenis indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif. Indikator positif menunjukkan bahwa semakin tinggi realisasi, maka capaian kinerja semakin baik. Sebaliknya, indikator negatif menunjukkan bahwa semakin rendah realisasi, maka capaian kinerja semakin baik. Oleh karena itu, pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda, yaitu:

c. Rumus pengukuran capaian kinerja untuk indikator positif

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

d. Rumus pengukuran capaian kinerja untuk indikator negative

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Adapun pengukuran kinerja mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval	Kriteria Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus memiliki sasaran strategis bidang kesehatan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa). Serta sasaran strategis penunjang, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator: nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Adapun capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Kriteria	Target Akhir Renstra
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	32,75	80,27	26,29	167,25	Sangat tinggi	80
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	6,7	7,50	6,92	107,7	Sangat tinggi	7
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 Kelahiran Hidup	8,1	8,19	8,06	101,59	Sangat tinggi	7,5
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,72	0,45	0,76	168,89	Sangat tinggi	0,5
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,99	93,43	70,10	75,03	Sedang	93,93

Tahun 2025 hasil capaian kinerja sasaran strategis 1 (urusan kesehatan) yaitu AKI, AKB, AKBa dan IKS melebihi dari target yang telah ditetapkan, dan tingkat capaian meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2024. Sedangkan hasil capaian kinerja sasaran 2 (urusan penunjang) yaitu nilai SAKIP tidak mencapai target tapi meningkat dibandingkan capaian tahun 2024.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

a. Capaian Tahun 2025

1) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKB didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi sejak lahir hingga sebelum mencapai usia satu tahun, yang dihitung per 1.000 kelahiran hidup dalam periode satu tahun. Kematian bayi mencakup kematian pada bayi usia 0–11 bulan, termasuk kematian neonatal, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, kecelakaan, bencana, cedera, maupun sebab lainnya. Secara normatif, nilai AKB dikategorikan sebagai sangat tinggi apabila lebih dari 70, tinggi pada rentang 40–70, sedang pada rentang 20–39, dan rendah apabila kurang dari 20.

Tahun 2025, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kudus menunjukkan penurunan dibandingkan

Tahun 2024, dari sebesar 32,75 menjadi 26,29 per 100.000 kelahiran hidup (3 kasus kematian ibu). Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk penguatan pelayanan kesehatan neonatal, peningkatan akses dan mutu pelayanan persalinan, serta upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Capaian tersebut menghasilkan persentase realisasi kinerja sebesar 167,25%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 129,87%, sehingga indikator AKB pada Tahun 2025 memperoleh predikat capaian kinerja sangat tinggi.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKB didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi sejak setelah kelahiran hingga sebelum mencapai usia satu tahun, yang dihitung per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Kematian bayi mencakup seluruh kejadian kematian pada bayi usia 0–11 bulan, termasuk kematian neonatal, baik yang disebabkan oleh kondisi kesehatan maupun akibat kecelakaan, bencana, cedera, atau sebab lainnya. Perhitungan AKB dilakukan dengan membagi jumlah kematian bayi di suatu wilayah kerja pada periode tertentu dengan jumlah kelahiran hidup pada wilayah yang sama dalam satu tahun, kemudian dikalikan 1.000. Secara normatif, nilai AKB dikategorikan sangat tinggi apabila lebih dari 70, tinggi pada rentang 40–70, sedang pada rentang 20–39, dan rendah apabila kurang dari 20.

Tahun 2025, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2024, yaitu dari 6,7 menjadi 6,92 per 1.000 kelahiran hidup. Kenaikan tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam upaya penurunan kematian bayi, terutama yang berkaitan dengan faktor kesehatan neonatal, kondisi ibu, serta determinan kesehatan lainnya. Meskipun demikian, capaian kinerja indikator AKB tetap menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan persentase realisasi sebesar 107,7%, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 129,87%. Berdasarkan hasil tersebut, capaian indikator Angka Kematian Bayi Tahun 2025 di Kabupaten Kudus masih berada pada predikat kinerja sangat tinggi.

3) Angka Kematian Balita (AKBa)

Angka Kematian Balita (AKBa) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kelangsungan hidup anak usia 0–4 tahun (0–59 bulan) serta mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kesehatan anak. AKBa didefinisikan sebagai jumlah kematian anak usia 0–4 tahun pada tahun tertentu per 1.000 penduduk anak pada kelompok umur yang sama di pertengahan tahun. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan serta mutu pelayanan KIA dan Posyandu, tingkat keberhasilan program kesehatan balita, serta kondisi sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

Perhitungan Angka Kematian Balita (AKBa) dilakukan dengan membagi jumlah penduduk yang meninggal pada usia 0–4 tahun (0–59 bulan) dalam periode tertentu dengan jumlah penduduk usia 0–4 tahun pada pertengahan tahun yang sama, kemudian dikalikan 1.000. Pada Tahun 2025, capaian Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Kudus telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), meskipun secara angka mengalami sedikit penurunan dibandingkan Tahun 2024, yaitu dari 8,1 menjadi 8,06 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan kesehatan balita, penguatan peran Posyandu, serta intervensi promotif dan preventif masih berjalan dengan baik.

4) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) perhitungannya diambil dari rekapitulasi data 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3 dari setiap keluarga di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dengan nilai skala 0 - 1, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila $IKS > 0,800$; 2) Keluarga Pra Sehat, bila $IKS = 0,500 - 0,800$; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila $IKS < 0,500$ adapun 12 indikator keluarga sehat terdiri dari : keluarga yang mengikuti keluarga berencana, persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, pertumbuhan balita dipantau, penderita TB paru berobat sesuai standard, penderita hipertensi berobat teratur, penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota JKN, keluarga mempunyai sarana air bersih dan keluarga menggunakan jamban sehat.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga sehat kabupaten kudus perhitungan Indeks Keluarga Sehat dari 12 indikator keluarga sehat yang dilaksanakan di 19 wilayah kerja puskesmas menunjukkan nilai IKS sebesar 0,76

artinya status kesehatan masyarakat kudus dikategorikan pra sehat. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2024. Peningkatan capaian tersebut dikarenakan peran aktif kader dan petugas untuk melakukan survei secara optimal, koordinasi lintas sektoral, pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menjangkau target secara keseluruhan serta adanya komitmen bersama menjadikan kudus kabupaten sehat.

b. Perbandingan dengan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran 1 terkait dengan angka kematian ibu, bayi dan balita serta Indeks Keluarga Sehat meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025, terutama kematian ibu terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan. Kematian balita ada penurunan sedikit, sedangkan kematian bayi ada peningkatan. Indeks Keluarga Sehat meskipun ada peningkatan capaian, namun masih termasuk dalam kriteria keluarga pra sehat.

c. Perbandingan dengan Akhir Periode Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024-2026, capaian kinerja tahun 2025 untuk angka kematian ibu dan bayi menunjukkan peningkatan capaian kinerja, namun masih perlu upaya lagi untuk penurunan angka kematian balita karena tahun 2025 angka kematian balita masih lebih tinggi dibandingkan target akhir tahun Renstra. Sedangkan Indeks Keluarga Sehat capaian kinerja lebih tinggi dibanding target akhir Renstra, namun masih belum mencapai kategori keluarga sehat. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

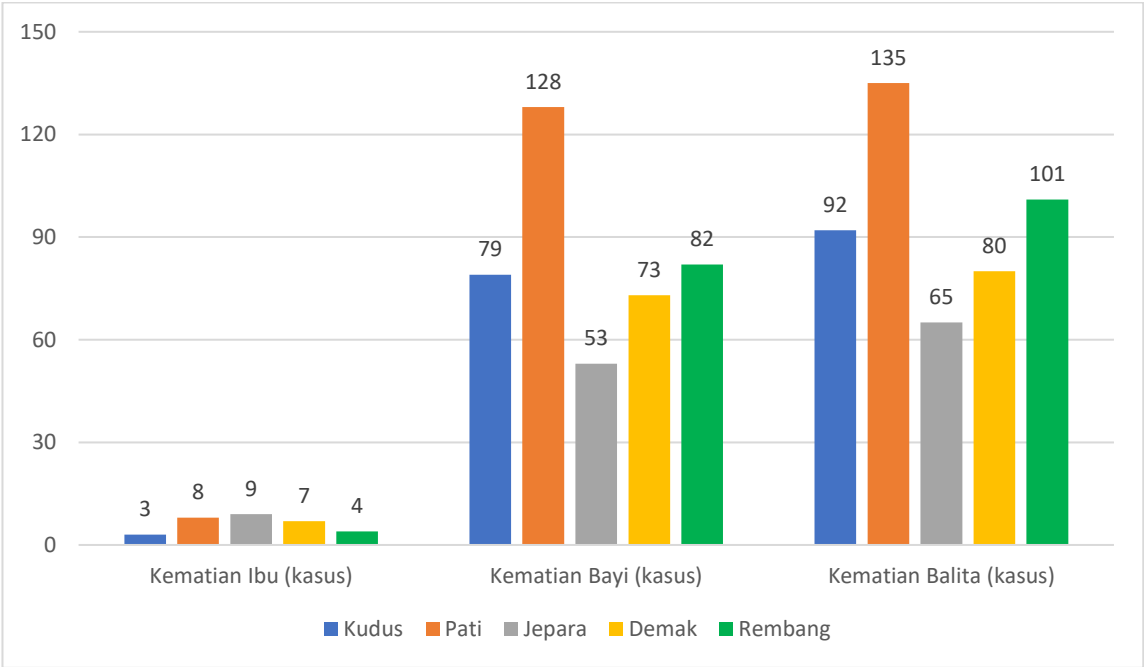
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Tahun	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	80	26,29	167,147%
	Angka Kematian Bayi (AKB)	7	6,92	101,14%
	Angka Kematian Balita (AKBa)	7,5	8,06	92,53%
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,5	0,76	152%

d. Perbandingan Kematian Ibu, Bayi dan Balita serta Prevalensi Stunting dengan Kabupaten Sekitar

Kematian ibu termasuk paling rendah jika dibandingkan 4 kabupaten sekitar (Pati, Rembang, Demak dan Jepara). Sedangkan kematian bayi dan balita termasuk urutan ketiga terendah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Berikut data kematian ibu, bayi dan balita Kabupaten Kudus dan sekitar:

Gambar 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025



2.Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

a. Capaian Tahun 2025

Nilai Evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah diperoleh dari nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Tim AKIP Inspektorat. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025, Target SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025 Dinas Kesehatan sebesar 92,43 dan memperoleh realisasi nilai 70,10 dengan predikat "BB" dengan capaian 75,03%. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik.

b. Perbandingan dengan Capaian Tahun 2024

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2024 realisasinya 66,99 dengan capaian kinerja 72,09%, meningkat dibanding tahun 2023. Tahun 2025 meningkat namun masih di bawah target, dengan realisasi nilai SAKIP sebesar 70,10 dengan capaian kinerja 75,03%.

c. Perbandingan dengan Akhir Periode Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024-2026, capaian kinerja tahun 2025 untuk indikator nilai SAKIP menunjukkan masih lebih rendah dibanding target akhir Renstra Tahun 2024-2026, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Tahun	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	93,93	70,10	74,63 %

Tingkat capaian sasaran 1 dan sasaran 2 didukung oleh program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan capaian sebesar 98,48% (sangat tinggi) berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	80,27	26,29	100,00
		(kasus)	4	3	100,00
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,5	6,92	100,00
	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 KH	8,19	8,06	100,00
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,45	0,76	100,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	103,65	100,00
	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100,00
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	99,34	99,34
	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100,00

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100,00
	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100,01	100,00
	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	98,54	98,54
	Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100,00
	Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100,00
	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100,00
	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	173,18	100,00
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	100	103,28	100,00
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1.000 penduduk	1,6	1,60	100,00
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (minimal strata utama)	Persen	100	100	100,00
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100,00
	Persentase Desa/ Kelurahan STBM	Persen	75	62	82,67
	Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	Persen	100	100	100,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	Persen	100	100	100,00

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen	100	100	100,00
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1	100,00
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	3	3	100,00
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	30	30	100,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	1	100,00
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	76	76	100,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	58	58	100,00
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	5	100,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	100	103,65	100,00
	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100,00
	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	99,34	99,34
	Cakupan balita ditimbang	Persen	100	100	100,00
	Cakupan penjangkaran pada usia pendidikan dasar	Persen	100	100	100,00
	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0.7	0,70	100,00

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Persen	83	83	100,00
	Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	Persen	100	100	100,00
	Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia	Persen	100	100	100,00
	Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur	Persen	100	100	100,00
	Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus	Persen	100	100	100,00
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persen	100	100	100,00
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	Persen	95	117	100,00
	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	Persen	90	85	94,44
	Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	Persen	100	100	100,00
	Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditanggulangi <24 jam	Persen	100	100	100,00
	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	100,00
	Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	Persen	100	100	100,00
	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Persen	98	99	100,00
	Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku	Persen	100	100	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11462	11.880	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11462	11.462	100,00

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11362	11.336	99,34
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	56984	56.984	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Orang	126551	126551	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	572447	572.447	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	103315	103.402	98,54
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	232426	232.426	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18032	18.032	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	2173	2.173	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	12869	22.378	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	16867	17.429	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	52	52	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12	12	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	12	12	100,00

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	12	100,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	12	100,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	12	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	125	125	100,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	156	156	100,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12	100,00
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	50	50	100,00
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	12	12	100,00
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	100,00
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	36	36	100,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	228	228	100,00
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	52	52	100,00
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	100,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang yang positif Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	826	3.091	100,00

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Orang yang Positif Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1908	709	37,16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah kelompok Orang dengan risiko Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3000	3.000	100,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	12	100,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan	Persen	100	100	100,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	3	3	100,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	Persen	100	100	100,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	44	30	68,18
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	11	11	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Persen	100	90	90,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	100	89,47	89,47
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	920	890	96,74

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	12	12	100,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya	Persen	100	90	90,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	73	73	100,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	Persen	100	100	100,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Persen	100	100	100,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	60	60	100,00
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persen	100	100	100,00

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	12	12	100,00
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan	Persen	100	100	100,00
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	12	12	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	81,73	100	100,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	100	100	100,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	12	12	100,00
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	80.5	80,5	100,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	12	100,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Posyandu aktif	Persen	85,7	100	100,00

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	12	100,00
	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Niai	93,43	70,10	75,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	42	44	100,00
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>79,57</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	35	35	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	32	32	100,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	100,00
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	100,00
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA</i>	<i>Persen</i>	<i>81,5</i>	<i>92,90</i>	<i>100,00</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	17.678	15.424	87,25
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiK euangan SKPD	Dokumen	72	72	100,00
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun</i>	<i>Persen</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	100,00

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen	100	100	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	15	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	100,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	114	114	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen	100	100	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	7	7	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	36	100,00

Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100	100	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	41	100,00
Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	52	52	100,00
Rata - rata capaian kinerja (%)				98,18	
Predikat Kinerja				Sangat tinggi	

❖ **Faktor pendorong:**

Tercapainya target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

- a) perbaikan kualitas layanan kesehatan melalui penambahan jumlah Fasyankes, pemenuhan sarana prasarana di Fasyankes dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- b) peningkatan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- c) Komitmen petugas dan tenaga kesehatan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun bersama guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d) dukungan anggaran terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

❖ **Faktor Penghambat:**

belum optimalnya pelibatan lintas sektor selain urusan kesehatan dalam mendukung dan berpartisipasi terutama dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

❖ **Alternatif Pemecahan Masalah**

- a) peningkatan promosi kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak;
- b) peningkatan penyediaan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan terutama bagi ibu dan anak baik di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maupun FKTRL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan).

3.3. Efisiensi Anggaran

Tahun 2025 menunjukkan efisiensi anggaran pada akhir tahun 2025 sebesar 7,35%. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6 (efisiensi anggaran sasaran dan program) serta table 3.7 (efisiensi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran pada
Sasaran dan Program Tahun 2025

Sasaran	Kode Rek.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	80,27	100.829.374.400	94.124.421.792	93,35	6,65
				(kasus)	4				
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,5				
			Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 KH	8,19				
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,45				
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				98.047.104.100	91.543.378.317	93,37	6,63
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				

Sasaran	Kode Rek.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				

Sasaran	Kode Rek.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	100				
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1.000 penduduk	1,6				
			Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (minimal strata utama)	Persen	100				
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100				
			Persentase Desa/ Kelurahan STBM	Persen	75				
			Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	Persen	100				
	01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Persen	100	857.956.800	795.644.670	92,74	7,26

Sasaran	Kode Rek.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	01:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	Persen	100	533.078.000	473.626.693	88,85	11,15
	01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	81,73	1.391.235.500	1.311.772.112	94,29	5,71
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Niai	93,43	134.550.583.820	126.535.072.079	94,04	5,96
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	42	134.550.583.820	126.535.072.079	94,04	5,96
TOTAL						235.379.958.220	218.078.450.396	92,65	7,35

Tabel 3.7

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	80,27	100.829.374.400	94.124.421.792	93,35	6,65
				(kasus)	4				
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,5				
			Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 KH	8,19				
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,45				
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				98.047.104.100	91.543.378.317	93,37	6,63
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100				
			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	100				
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1.000 penduduk	1,6				
			Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (minimal strata utama)	Persen	100				
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100				
			Persentase Desa/ Kelurahan STBM	Persen	75				
			Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	Persen	100				

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.2.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	Persen	100	31.050.521.100	28.397.404.585	91,46	8,54
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen	100				
	1.2.2.201.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1.213.500.000	912.250.880	75,18	24,82
	1.2.2.201.3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	3	2.396.625.000	2.004.040.453	83,62	16,38
	1.2.2.201.6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	10	7.781.290.000	7.743.736.134	99,52	0,48
	1.2.2.201.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	2.045.986.500	1.698.196.362	83,00	17,00
	1.2.2.201.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	76	3.516.999.000	3.417.381.399	97,17	2,83

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.2.201.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	58	247.543.000	179.102.059	72,35	27,65
	1.2.2.201.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, BahanHabis Pakai, BahanMedis Habis Pakai,Vaksin, Makanan danMinuman di FasilitasKesehatan yangdisediakan	Paket	4	13.848.577.600	12.442.697.298	89,85	10,15
	1.2.2.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	100	66.114.146.300	59.807.936.637	90,46	9,54
			Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	100				
			Cakupan kunjungan bayi	Persen	100				
			Cakupan balita ditimbang	Persen	100				
			Cakupan penjangkaran pada usia pendidikan dasar	Persen	100				
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0.7				
			Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Persen	83				

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	Persen	100				
			Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia	Persen	100				
			Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur	Persen	100				
			Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus	Persen	100				
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persen	100				
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	Persen	95				
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	Persen	90				
			Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	Persen	100				
			Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditanggulangi <24 jam	Persen	100				

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100				
			Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	Persen	100				
			Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Persen	98				
			Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku	Persen	100				
	1.2.2.202.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11462	250.000.000	224.607.996	89,84	10,16
	1.2.2.202.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11462	133.000.000	118.990.250	89,47	10,53
	1.2.2.202.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11362	123.000.000	90.395.700	73,49	26,51
	1.2.2.202.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	56984	714.000.000	59.561.222	8,34	91,66

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.2.202.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Orang	126551	305.000.000	286.863.901	94,05	5,95
	1.2.2.202.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	572447	421.484.000	398.117.569	94,46	5,54
	1.2.2.202.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	103315	36.836.500	35.352.300	95,97	4,03
	1.2.2.202.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	232426	204.330.000	196.000.000	95,92	4,08
	1.2.2.202.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18032	23.020.000	20.000.000	86,88	13,12
	1.2.2.202.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	2173	45.959.000	45.734.000	99,51	0,49
	1.2.2.202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	12869	151.683.600	126.837.349	83,62	16,38

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.2.202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	16867	245.195.800	237.660.400	96,93	3,07
	1.2.2.202.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	52	10.645.500	7.472.200	70,19	29,81
	1.2.2.202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12	3.232.784.700	2.797.378.205	86,53	13,47
	1.2.2.202.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	12	132.083.900	122.278.604	92,58	7,42
	1.2.2.202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	430.845.000	335.950.054	77,97	22,03
	1.2.2.202.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	723.591.500	668.869.061	92,44	7,56
	1.2.2.202.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	82.833.800	65.475.550	79,04	20,96
	1.2.2.202.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	125	82.130.000	80.535.000	98,06	1,94

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.2.202.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	156	369.594.600	336.440.607	91,03	8,97
	1.2.2.202.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	56.239.342.200	51.824.799.540	92,15	7,85
	1.2.2.202.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	50	215.000.000	155.017.832	72,10	27,90
	1.2.2.202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	12	50.000.000	35.227.000	70,45	29,55
	1.2.2.202.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	12.165.000	2.454.400	20,18	79,82
	1.2.2.202.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	36	241.149.200	115.411.000	47,86	52,14
	1.2.2.202.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	228	200.000.000	179.914.598	89,96	10,04

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.2.202.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	52	150.000.000	109.543.517	73,03	26,97
	1.2.2.202.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	666.335.000	571.989.682	85,84	14,16
	1.2.2.202.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang yang positif Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	826	36.500.000	34.649.000	94,93	5,07
	1.2.2.202.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Orang yang Positif Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1908	113.040.000	91.296.200	80,76	19,24
	1.2.2.202.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah kelompok Orang dengan risiko Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3000	3.206.000	3.063.400	95,55	4,45
	1.2.2.202.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	469.391.000	430.050.500	91,62	8,38
	1.2.2.203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan	Persen	100	315.000.000			

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.2.203.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	3	315.000.000	288.310.240	91,53	8,47
	1.2.2.204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	Persen	100	567.436.700			
	1.2.2.204.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	44	540.923.300	443.436.480	81,98	18,02
	1.2.2.204.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	11	26.513.400	25.246.900	95,22	4,78
	01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Persen	100	857.956.800	795.644.670	92,74	7,26
	1.2.3.202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	100	128.319.800	96.357.640	75,09	24,91
	1.2.3.202.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	50.000.000	32.477.900	64,96	35,04

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.3.202.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	920	50.000.000	37.058.740	74,12	25,88
	1.2.3.202.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	12	28.319.800	26.821.000	94,71	5,29
	1.2.3.203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya	Persen	100	729.637.000	699.287.030	95,84	4,16
	1.2.3.203.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	73	729.637.000	699.287.030	95,84	4,16
	01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	Persen	100	533.078.000	473.626.693	88,85	11,15

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.4.203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Persen	100	232.568.000	193.782.100	83,32	16,68
	1.2.4.203.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	60	232.568.000	193.782.100	83,32	16,68
	1.2.4.204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persen	100	75.000.000	67.988.600	90,65	9,35

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.4.204.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	12	75.000.000	67.988.600	90,65	9,35
	1.2.4.205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan	Persen	100	225.510.000	211.855.993	93,95	6,05
	1.2.4.205.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	12	225.510.000	211.855.993	93,95	6,05
	01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	81,73	1.391.235.500	1.311.772.112	94,29	5,71
	1.2.5.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	100	858.463.500	815.288.644	94,97	5,03

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.2.5.201.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	12	858.463.500	815.288.644	94,97	5,03
	1.2.5.202	<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>	<i>Persen</i>	80.5	350.000.000	326.668.840	93,33	6,67
	1.2.5.202.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	350.000.000	326.668.840	93,33	6,67
	1.2.5.203	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Posyandu aktif</i>	<i>Persen</i>	85.7	182.772.000	169.814.628	92,91	7,09
	1.2.5.203.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	182.772.000	169.814.628	92,91	7,09
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Niai	93,43	134.550.583.820	126.535.072.079	94,04	5,96

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	42	134.550.583.820	126.535.072.079	94,04	5,96
	1.02.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>810.510.300</i>	<i>644.888.842</i>	<i>79,57</i>	<i>20,43</i>
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	35	367.211.400	242.503.322	66,04	33,96
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	32	431.633.900	398.410.520	92,30	7,70
	1.02.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	6.365.000	-	0,00	100,00
	1.02.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	5.300.000	3.975.000	75,00	25,00
	1.02.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA</i>	<i>Persen</i>	<i>81,5</i>	<i>126.846.934.500</i>	<i>119.776.138.914</i>	<i>94,43</i>	<i>5,57</i>
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	17.678	126.689.462.000	119.642.257.914	94,44	5,56

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	133.828.000	112.955.000	84,40	15,60
	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Dokumen	72	23.644.500	20.926.000	88,50	11,50
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen	50	120.000.000	118.819.950	99,02	0,98
	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	120.000.000	118.819.950	99,02	0,98
	1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen	100	399.067.300	375.434.591	94,08	5,92
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	18.366.500	18.356.200	99,94	0,06
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	211.552.300	209.047.172	98,82	1,18
	1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	17.876.500	17.607.400	98,49	1,51

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	59.651.000	44.081.000	73,90	26,10
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	22.465.000	20.094.900	89,45	10,55
	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4.200.000	4.200.000	100,00	0,00
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	64.956.000	62.047.919	95,52	4,48
	1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	440.823.000	414.286.273	93,98	6,02
	1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	340.945.000	322.770.370	94,67	5,33
	1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	114	99.878.000	91.515.903	91,63	8,37
	1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen	100	4.913.586.000	4.270.658.895	86,92	13,08
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	150.000	48.000	32,00	68,00

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	517.710.000	448.358.938	86,60	13,40
	1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	7	82.196.000	60.659.500	73,80	26,20
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	4.313.530.000	3.761.592.457	87,20	12,80
	1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100	1.019.662.720	934.844.614	91,68	8,32
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	257.432.000	181.139.093	70,36	29,64
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	52	762.230.720	753.705.521	98,88	1,12
TOTAL						235.379.958.220	218.078.450.396	92,65	7,35

3.4. Inovasi dan Penghargaan

1. Inovasi

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Kesehatan, terdapat inovasi yang sampai saat ini masih dilaksanakan dan dikembangkan oleh Dinas Kesehatan, yaitu:

a. Rumah Gizi ‘Teman Bintangku’

Rumah Gizi “Teman Bintangku” merupakan salah satu inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan promotif, preventif, dan kuratif secara terpadu. Inovasi ini dikembangkan sebagai wadah layanan terpadu yang berfokus pada peningkatan status gizi balita, khususnya balita berisiko stunting, balita stunting, serta ibu hamil dengan risiko kekurangan energi kronis (KEK).

Tujuan utama penyelenggaraan Rumah Gizi “Teman Bintangku” adalah meningkatkan status gizi sasaran melalui pendampingan intensif, peningkatan pengetahuan dan perilaku keluarga dalam pemenuhan gizi seimbang, serta memperkuat peran keluarga dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Selain itu, inovasi ini bertujuan meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanganan masalah gizi secara berkelanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Rumah Gizi “Teman Bintangku” meliputi skrining dan pemantauan status gizi balita secara berkala, pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, edukasi gizi dan praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA), konseling gizi kepada orang tua, pemantauan tumbuh kembang anak, serta kunjungan rumah bagi sasaran dengan risiko tinggi. Kegiatan juga didukung dengan pelibatan tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta pendamping keluarga guna memastikan keberlanjutan intervensi di tingkat rumah tangga.

Keberadaan Rumah Gizi “Teman Bintangku” memberikan kontribusi nyata dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kudus melalui peningkatan cakupan intervensi spesifik gizi, perbaikan pola asuh dan pola makan keluarga, serta percepatan perbaikan status gizi pada balita bermasalah gizi. Pendampingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia balita, sehingga mendukung upaya pemerintah daerah dalam menurunkan prevalensi stunting secara bertahap dan berkelanjutan.

- b. Si Cantik (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif)

Si Cantik merupakan upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, melalui intervensi kolaboratif yang tepat sasaran dan tepat guna dengan mendekatkan akses layanan ke masyarakat.

Strategi “Si Cantik” telah dilaksanakan di semua wilayah Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan Kelas “Si Cantik” untuk pemberian intervensi spesifik dan sensitive, pendampingan sasaran oleh kader, serta kampanye perubahan perilaku dengan Gerakan “Info Minggu Cantik” melalui semua media sosial.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2025 terjadi penurunan kasus stunting dibandingkan pada tahun sebelumnya. Balita stunting mengalami kenaikan status gizi, serta balita bermasalah gizi lain mengalami perbaikan sehingga dapat dicegah munculnya kasus stunting baru.

- c. SBN (Sekolah Bebas Nyamuk): Kolaborasi Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sebagai Pengendalian Infeksi Dengue di Kabupaten Kudus

(SBN) Sekolah Bebas Nyamuk bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian infeksi dengue, serta minimalisasi penggunaan fogging yang tidak sesuai SOP melalui penggerakan PSN 3M Plus sejak dini. Program Sekolah Bebas Nyamuk menasar anak usia sekolah baik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Kudus. Anak usia sekolah (5-14 tahun) merupakan kelompok yang rentan terserang infeksi dengue. Selain itu, anak sekolah merupakan *agent of change* di masa depan.

Program SBN merupakan Solusi yang inovatif dengan memanfaatkan siswa sebagai Siswa Pemantau Jentik (Simantik) untuk memonitor keberadaan jentik di lingkungan sekolah. Inovasi ini menonjol karena mengedepankan partisipasi anak sekolah yang berperan sebagai agen perubahan.

2. Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi dan penghargaan yang

dicapai pada tahun 2025. Adapun prestasi dan penghargaan tersebut sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Penghargaan dan Prestasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
Tahun 2025

NO.	TANGGAL/ TAHUN	LEVEL	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	22 Oktober 2025	Nasional	ATM Award 2025	Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes)	Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan AIDS- Tuberkulosis- Malaria (ATM) di Daerah
2	28 November 2025	Nasional	Swasti Saba Padapa	Kementerian Kesehatan	Atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten/ Kota Sehat Tahun 2025
3	7 Agustus 2025	Provinsi Jawa Tengah	Juara II - Pemenang Implementasi Integrasi Layanan Primer Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan dan Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Diberikan kepada Posyandu Kenangan Desa Megawon, Puskesmas Ngembal Kulon, Kabupaten Kudus
4	20 November 2025	Provinsi Jawa Tengah	Pencapaian Kinerja Program Imunisasi Terbaik Tahun 2025	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	
5	8 Desember 2025	Provinsi Jawa Tengah	Lomba Puskesmas Bersih Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Diberikan kepada Puskesmas Jekulo
6	11 Juni 2025	Se- Wilayah Jawa Tengah - DIY	Apresiasi Kepatuhan Pembayaran Iuran Program JKN	BPJS	

BAB IV

PENUTUP

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab teknis pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kudus, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran yang ada.

4.1. Kesimpulan

1. Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menetapkan sebanyak 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Sasaran 1: meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terdiri Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan Indeks Keluarga Sehat (IKS) menunjukkan capaian kinerja di atas target (lebih dari 100%);
 - b. Sasaran 2: meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP menunjukkan tingkat capaian sebesar 75,03% (tidak mencapai target).
2. Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.235.379.958.220,-, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.218.078.450.396,-. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 92,65%.
3. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus diantaranya adalah perbaikan layanan kesehatan yang meliputi penambahan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia

kesehatan. Upaya tersebut didukung dengan penguatan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan serta penanggulangan penyakit, komitmen petugas dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun bersama, serta dukungan anggaran yang memadai guna menunjang pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara optimal.

4. Faktor penghambat tercapainya indikator kinerja terutama Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah belum optimalnya pelibatan lintas sektor selain urusan kesehatan dalam mendukung dan berpartisipasi terutama dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, langkah perbaikan yang dilakukan meliputi:

1. Optimalisasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
2. Optimalisasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga untuk peningkatan capaian target menjadi kategori keluarga sehat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
3. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan primer berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peningkatan upaya preventif dan promotif untuk mencapai perilaku masyarakat hidup sehat;
5. Penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan;
6. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya guna mendukung pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien; serta
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor seperti lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan swasta dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kudus kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kudus.

Kudus, 29 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
Wakil Direktur Pelayanan
RSUD dr. Loekmono Hadi,



dr. MUSTIKO WIBOWO
Pembina Tk.I
NIP. 198209152009031004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : HERDA HELMIJAYA, S.E

Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



HERDA HELMIJAYA, S.E

Kudus, 14 Januari 2025

Pihak Pertama,



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,50 per 1.000 kh
	Angka Kematian Balita (AKBa)	8,19 per 1.000 kh
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,45 Nilai
	Angka Kematian Ibu (AKI)	80,27 per 100.000 kh
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	93,43 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.242.292.100	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	87.012.484.400	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	879.637.000	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	339.568.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.157.772.000	
TOTAL		232.631.753.500	

PJ. BUPATI KUDUS,

HERDA HELMIJAYA, S.E

Kudus, 14 Januari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T.

Jabatan : BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T.

Kudus, 1 September 2025
Pihak Pertama,

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,45 Nilai
	Angka Kematian Ibu (AKI)	80,27 per 100.000 kh
	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,50 per 1.000 kh
	Angka Kematian Balita (AKBa)	8,19 per 1.000 kh
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	93,43 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.550.583.820	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	98.047.104.100	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	857.956.800	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	533.078.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.391.235.500	
TOTAL		235.379.958.220	


BUPATI KUDUS,
Dr. Ars. SAM ANSINTAKORIS, S.T., M.T.

Kudus, 1 September 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. MUSTIKO WIBOWO

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T.

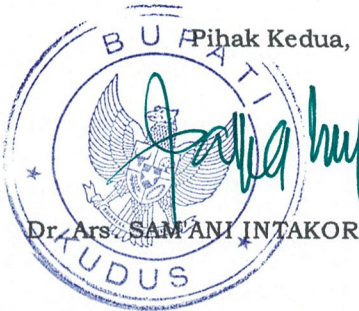
Jabatan : BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T.

Kudus, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,



dr. MUSTIKO WIBOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 198209152009031004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Balita (AKBa)	8,19 per 1.000 kh
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,45 Nilai
	Angka Kematian Ibu (AKI)	80,27 per 100.000 kh
	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,50 per 1.000 kh
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	93,43 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.550.583.820	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	98.047.104.100	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	857.956.800	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	533.078.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.391.235.500	
TOTAL		235.379.958.220	

BUPATI KUDUS,



Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T.

Kudus, 1 Oktober 2025

PIL. KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. MUSTIKO WIBOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 198209152009031004

INOVASI TERKAIT UPAYA PENCEGAHAN/ PENURUNAN DBD DAN STUNTING

Upaya Percepatan Penurunan Stunting melalui Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif (SI CANTIK) di Kabupaten Kudus

Upaya Percepatan Penurunan Stunting melalui Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif (SI CANTIK) di Kabupaten Kudus

IMPLEMENTASI

Kelas CANTIK di setiap UPTD Puskemas sebagai Intervensi Medis bagi Balita dengan masalah gizi

Pendampingan kasus balita dengan masalah gizi & Perubahan perilaku sebagai upaya edukasi pencegahan masalah gizi & stunting.

Pemberian PMT susu dan telur (PKMK, PDK dan PMT Lokal

INOVASI SEKOLAH BEBAS NYAMUK

PENCANANGAN SISWA PEMANTAU JENTIK (SIMANTIK) MENUJU SEKOLAH BEBAS NYAMUK KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024



RUMAH GIZI TEMAN BINTANGKU ...

(Tumbuh Sehat, Belajar, BerMAIN
Bersama Ibu Dan ANak Cegah STunting KeluArga UNGgul KUDus)

TUJUAN :
Mewujudkan Pelayanan Rumah Gizi yang Berlandaskan Asas BINTANGKU melalui Pendekatan Keluarga Menuju Kudus Sehat

Kegiatan di Rumah Gizi :





JADWAL PELAYAN:
SENIN-KAMIS 08.00-13.00 WIB
JUMAT 08.00-10.00 WIB

Jl.Tanjung Karang Gang II No.10 Sebelah Utara Kantor Kecamatan Jati







• Pengukuran Antropometri • Konsultasi Spesialis Dokter anak • Konsultasi Gizi • Fisioterapis • Konsultasi Psikolog

Pelayanan Teman Bintangku



Pengukuran Antopometri



Dokter Spesialis Anak



Fisioterapis



Psikolog



Edukasi Gizi & Konsultasi Gizi



Belajar Bersama di Yuk Main Yuk



Belajar Bersama KB Al-azhar

PENGHARGAAN TAHUN 2025

1. ATM Award 2025 (Tingkat Nasional)



2. Swasti Saba Padapa (Tingkat Nasional)



3. **Juara II - Pemenang Implementasi Integrasi Layanan Primer Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan dan Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan (Tingkat Provinsi Jawa Tengah)**



4. **Pencapaian Kinerja Program Imunisasi Terbaik Tahun 2025 (Tingkat Provinsi Jawa Tengah)**



5. **Lomba Puskesmas Bersih Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Tingkat Provinsi Jawa Tengah)**



6. Apresiasi Kepatuhan Pembayaran Iuran Program JKN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Pertemuan Lintas Sektor Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Penanggulangan Dengue Kabupaten Kudus



Bimtek Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga



Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Money Mutu Rumah Sakit



Sosialisasi One Single Submission (OSS) bagi Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kecamatan



Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di DPRD Kabupaten Kudus



Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Perusahaan



Layanan SPELING (Spesialis Keliling)



Best Practise Kabupaten Kudus dalam Penurunan Kematian Ibu dan Bayi di Kemenkes



Layanan Pengobatan Gratis



Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji



Sosialisasi Buku Kesehatan



Pelatihan Ketrampilan Dasar Kader Posyandu



Festival Keluarga Sehat



Pelatihan *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS) bagi dokter



Kunjungan Pemenuhan Komitmen Pasca Terbitnya Nomor PIRT

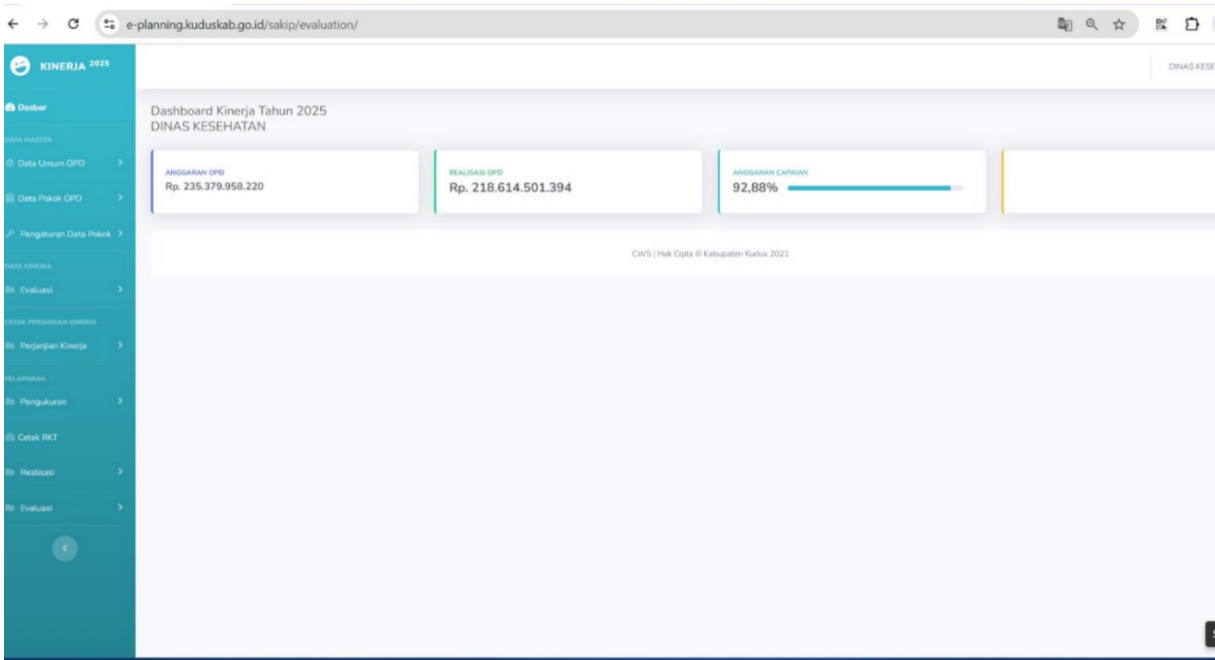


Visitasi Pelayanan Kesehatan Tradisional

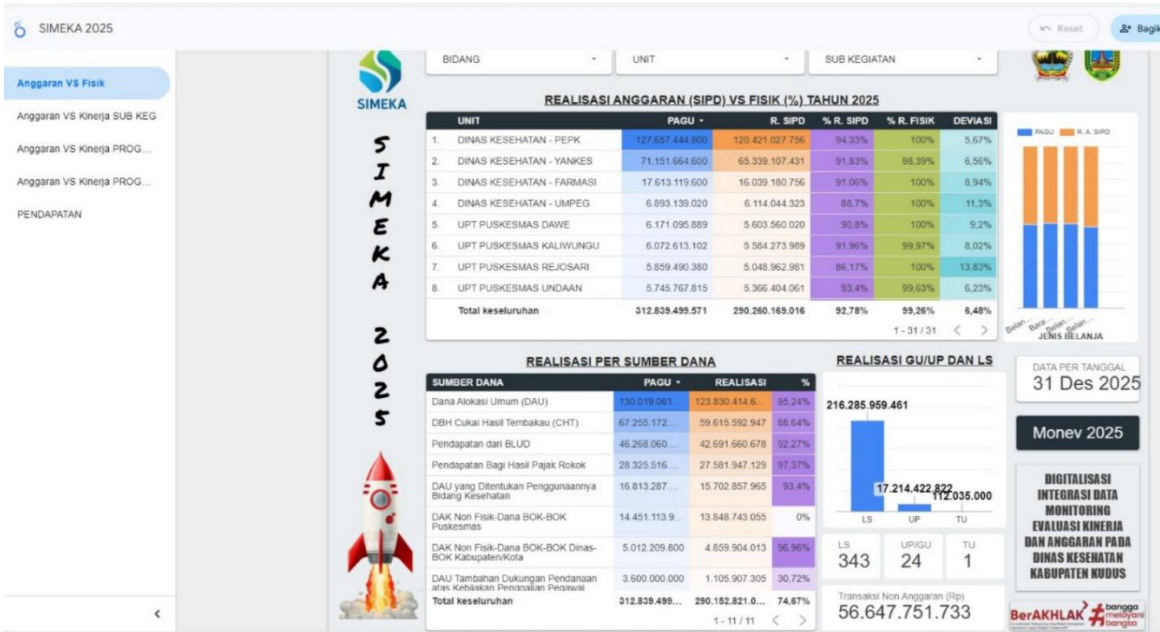
INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

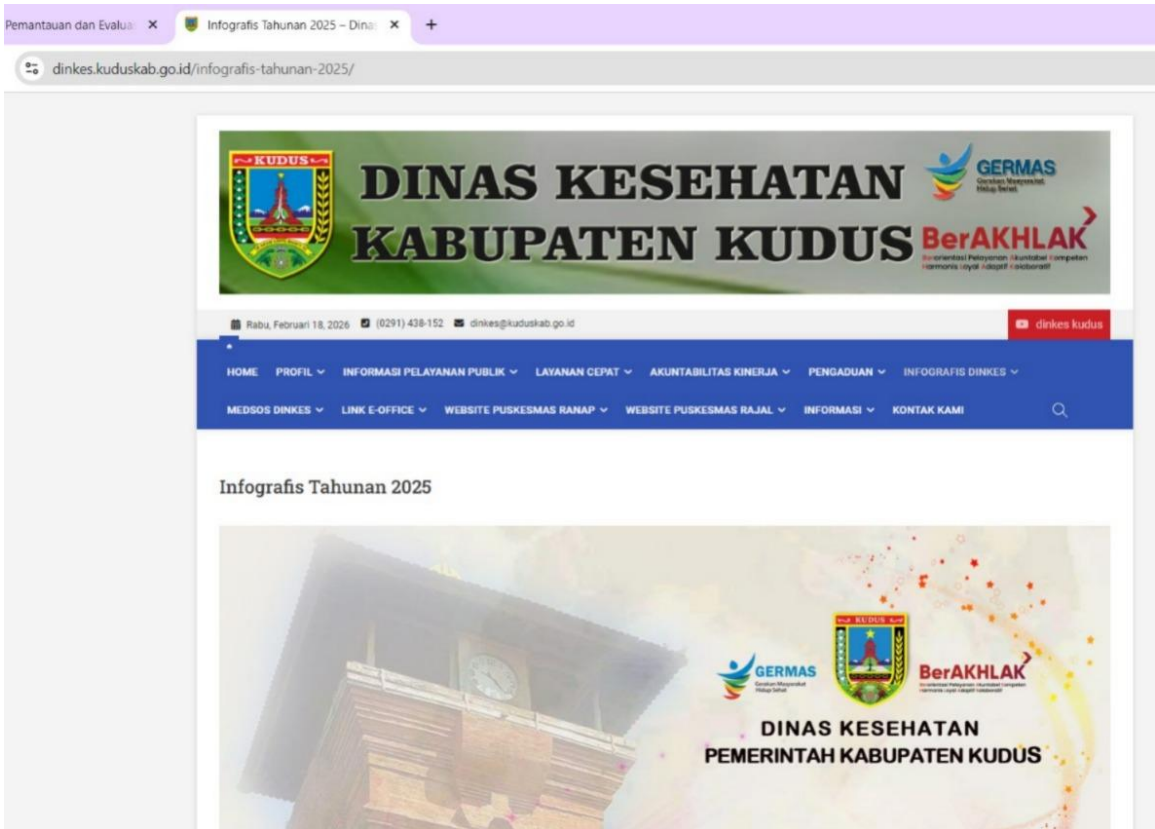
1. Aplikasi siPEPAK
- (<https://e-planning.kuduskab.go.id/sakip/evaluation/>)
- Merupakan aplikasi untuk pelaporan, monitoring, evaluasi kinerja utama perangkat daerah, evaluasi renja dan lainnya untu Perangkat Daerah se-Kabupaten Kudus



2. Aplikasi SIMEKA (Digitalisasi Integrasi Data Monitoring Evaluasi Kinerja dan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus)



3. Website Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus



4. Media Sosial Dinas Kesehatan

a. Instagram



b. Tiktok



Dinkes Kudus
@dinkeskudus15

58
Mengikuti

1.226
Pengikut

3.839
Suka

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Kirim pesan

Tindakan lainnya

▼

⋮

↺↻



▶ 2.489



▶ 751



▶ 690



▶ 907

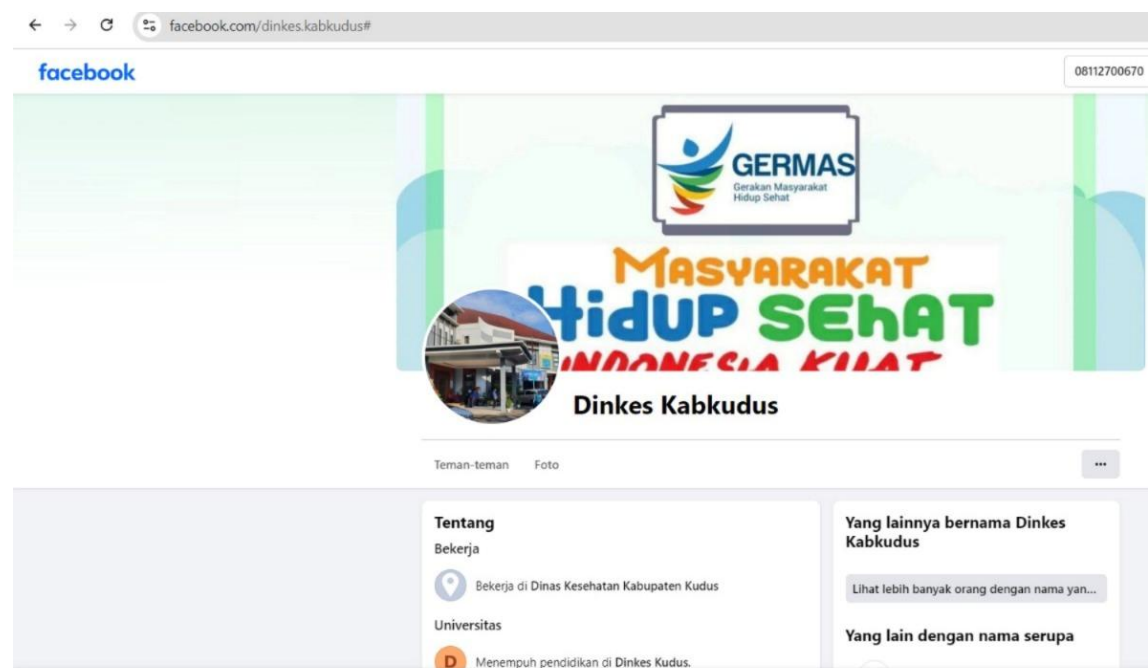


▶ 859

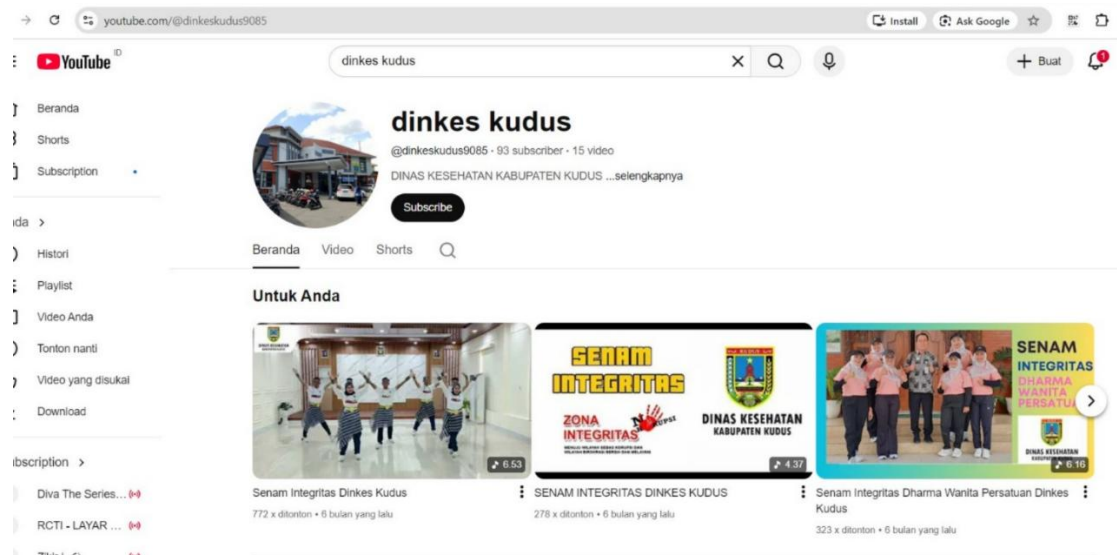


▶ 5.455

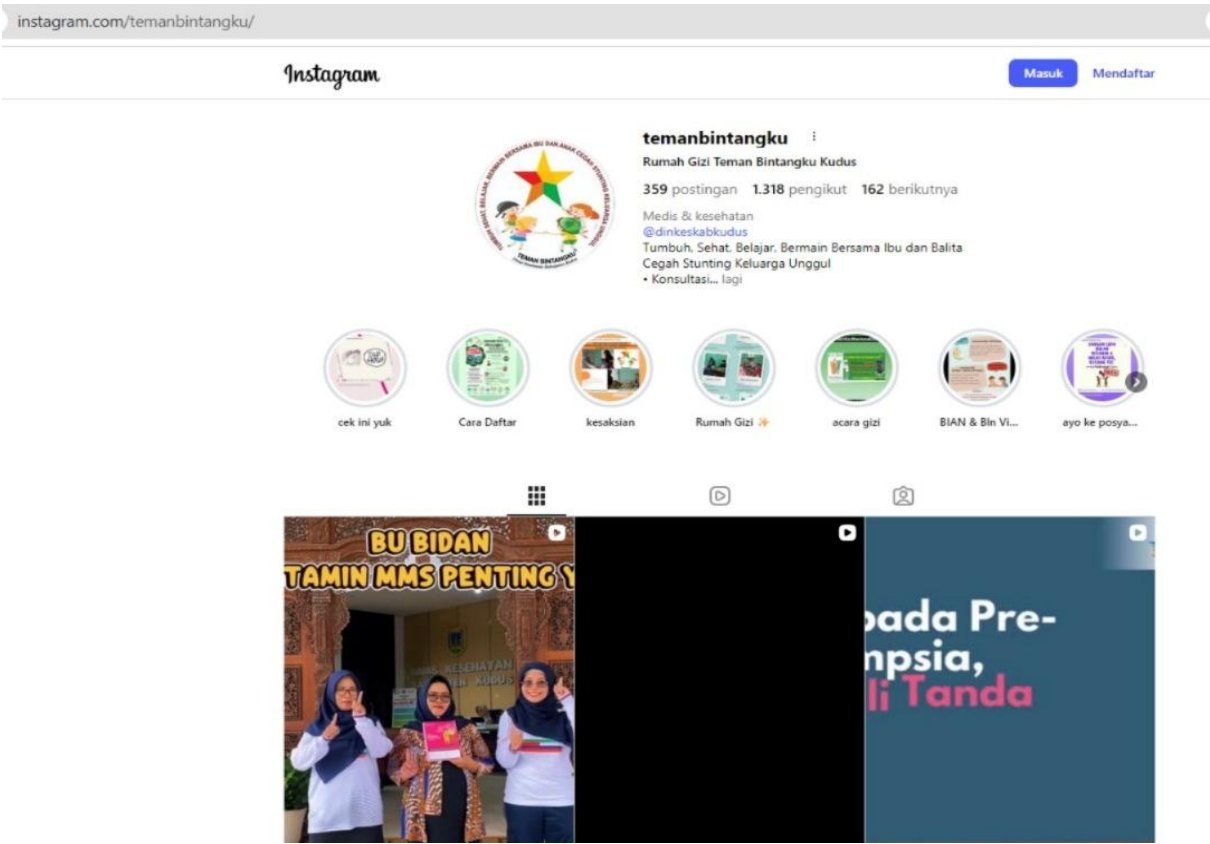
c. Facebook Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus



d. Youtube Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus



e. Instagram Rumah Gizi “Teman Bintangku”



f. Instagram PSC 119

